
FILM SEBAGAI PROPAGANDA DI INDONESIA
Eka Nada Shofa Alkhajar, Firdastin Ruthnia Yudiningrum, Agus Sofyan*

Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS

Jl. Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

 Email: ekanadashofa@yahoo.com

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Mei 2013

Disetujui Juni 2013

 Dipublikasikan Juni 2013

Keywords:
film in which the context is propaganda

Abstrak

Melalui studi dokumen sebagai pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana film memerankan fungsi propaganda dari masa ke masa, khususnya dari zaman kolonial hingga Orde Baru serta mengetahui maksud dari propaganda itu dibuat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa film bukanlah media yang netral melainkan bergantung kepada sang pembuat yang menggunakan sudut pandang tertentu melakukan rekaman realitas melalui media film. Sudut pandang ini dapat disuntikkan, ditempelkan, dan dikonstruksikan ke dalam film di mana dalam konteks ini adalah propaganda. Temuan mendasar lain dari penelitian ini antara lain: Pertama, adanya relasi yang erat di mana penguasa (pemerintah) tanggap untuk menjadikan media film sebagai alat propaganda dengan berbagai maksud dan tujuan yang diinginkan penguasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa propaganda merupakan usaha sadar, sistematis, terencana dan bertujuan konkrit. Kedua, kecenderungan makna propaganda yang muncul senantiasa berkaitan dengan maksud pembentukan “image” penguasa yang baik dan hebat. Selain itu, propaganda yang dijalankan berpamrih pula untuk menarik simpati dan dukungan rakyat, legitimasi, *status quo* ataupun membentuk distorsi kesadaran sekaligus melakukan pembentukan sejarah versi “penguasa”. Ketiga, melalui film sesungguhnya kita dapat mengetahui mentalitas, relasi kuasa hingga identitas sebuah bangsa serta fakta zaman yang terekam dan tersimpan dalam teks-teks film karena tentunya film lahir dengan lingkupan sosio kultur atau konteks suatu zaman tertentu.

Abstract

Through the study of the document as a qualitative approach, this study aims to determine how the film plays the propaganda functions from time to time, particularly from the colonial era to the New Order and know the purpose of propaganda was made. The results of this study found that the film is not a neutral medium but rather depends on the maker who uses a particular viewpoint of recording reality through the medium of film. This perspective can be injected, taped and constructed into a film in which the context is propaganda. Another fundamental findings of this study are: First, the existence of a close relationship in which the rulers (government) response to be the medium of film as a tool of propaganda with the intent and purpose

of the authorities want. So it can be said that propaganda is a conscious, systematic, planned and aimed at concrete. Second, the meaning of propaganda emerging trend is always related to the purpose of the establishment the good and great "image" of ruler. In addition, the propaganda carried on anyway have the intention to attract the sympathy and support of the people, legitimacy, status quo or any form of distortion awareness and conduct establishment version of history "ruler". Third, through the film we actually can know the mentality, the power relation to the identity of a nation, and the fact that the time recorded and stored in the texts of the film because the film certainly born with the socio-cultural scope or context of a particular age.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
ekanandashofa@yahoo.com

PENDAHULUAN

Sejak awal kemunculannya film terbukti memiliki kemampuan membius penontonnya secara hebat (Ismail, 1983). Fiske pun menuturkan bahwa terbukti hingga kini film tetap dikenal seantero dunia dan tetap bertahan di tengah hiruk-pikuk media di dunia (Fiske, 1990). Merujuk pada Alkhajar, sudah semenjak tahun 1930an, Paul Rotha menyatakan bahwa film merupakan penemuan teknologi terbesar sepanjang masa dimana keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari dua arah yang melingkupinya secara bersamaan: budaya dan komersial. Dalam abad kedua puluh satu ini, film yang juga merupakan salah satu bentuk budaya kontemporer telah menjadi industri bernilai ribuan dollar Amerika (Alkhajar, 2010: 1).

Film mahir membuat kejutan dan ketakjuban. Budi Irawanto mencatat bahwa hal demikian nampaknya dialami pula oleh para pengunjung di ruang bawah tanah Grand Café di Boulevard de Capucines No. 14 Perancis, ketika seabad silam Lumiere Bersaudara mempertontonkan "hasil

percobaannya" kepada para pengunjung kafe itu. Pertunjukkan yang diiklankan kembali sebagai "keajaiban gambar hidup" itu dalam kenyataannya membuat penonton takjub, tertawa-tawa dan juga riuh karena terkaget-kaget. Saat itu, untuk pertama kalinya film dipertontonkan dengan membayar dan konon, keuntungan yang ditanggung lewat tontonan itu mencapai tiga juta franc. Peristiwa pada 28 Desember 1895 ini menjadi titik awal film sebagai medium hiburan yang tak kunjung surut popularitasnya hingga kini (Irawanto, 1999: v)

Namun demikian ada satu hal yang pasti bahwa film bukanlah sebuah entitas yang netral dan bebas nilai. Film tidak pula lahir dari ruang kosong. Lebih dari itu, film merupakan media yang efektif dalam membawa pesan-pesan yang memang dilekatkan dan ditanamkan padanya untuk kemudian disampaikan kepada segenap penontonnya (Alkhajar, 2011: 61).

Penelitian ini membidik konteks berbeda dengan kebiasaan riset film kekinian di mana fokusnya adalah berbagai pernak-pernik perfilman masa kini. Sementara itu,

banyak khasanah rona-rona perfilman di masa lampau yang belum tergalai dengan baik bahkan terlupakan. Riset ini mengisi ruang kosong riset film yang belum banyak dijamah. Penelitian ini mencoba mengungkap perihal film dalam konteks sebagai propaganda dari masa ke masa di Indonesia khususnya zaman kolonial (Belanda dan Jepang), Orde Lama dan Orde Baru. Di samping itu, penelitian ini juga mencoba menelaah dalam maksud untuk apa propaganda itu dilakukan. Karena sesungguhnya melalui film kita dapat belajar mengenai banyak hal dalam konteks kehidupan bahkan mampu mencandra mentalitas suatu bangsa sebagaimana pernah dilontarkan Sigfried Kracauer (1974: 6).

Dalam perkembangan teori film, setidaknya kini film tidak lagi dipandang sebagai sebuah bentuk seni *an sich (film as art)* melainkan juga sebagai komunikasi massa (refleksi masyarakat) maupun praktik sosial. Jowett dan Linton (1980) berpandangan bahwa film adalah refleksi dari masyarakat dimana film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kemudian memproyeksikannya ke layar. Hal ini ditentang oleh Turner (1993) dimana ia mengungkapkan film tidak sekedar “memindahkan” realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu melainkan film membentuk dan “menghadirkan kembali” kode-kode, konvensi-konvensi dan ideologi dari kebudayaannya (*social practice*) (Alkhajar, 2011: 62).

Kemudian, propaganda dapat ibaratkan sebuah ilmu. Ilmu itu akan membuahkan hasil positif jika melekat pada orang yang mempunyai kepribadian baik. Namun, propaganda akan menghasilkan

kejelekan dan kesengsaraan manakala melekat pada orang yang tidak baik. Propaganda sendiri merupakan salah satu metode komunikasi. Dalam konteks ini sama halnya dengan komunikasi, propaganda bertujuan mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain, di mana jika digunakan oleh orang berbeda tentu akan berdampak berbeda pula (Nurudin, 2001: 5-6).

Jika metode komunikasi ini digunakan oleh orang yang mempunyai ambisi kekuasaan tentu hanya akan digunakan untuk target kekuasaan tersebut tanpa mengindahkan apakah hal tersebut membahayakan orang lain, memperkosa hak asasi orang lain atau tidak. Apakah berbohong atau tidak tak jadi soal. Yang paling utama adalah target politiknya tercapai. Dengan demikian, propaganda adalah sebuah ilmu yang bisa jadi akan menjadi baik, namun juga bisa akan menjadi buruk sangat bergantung dari siapa yang menggunakan serta target apa yang sedang diraih. Ini dimungkinkan mengingat propaganda hanya sekadar cara-cara berkomunikasi dan penyebaran pesan kepada orang lain. Sedangkan cara itu akan disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan individu atau suatu kelompok masyarakat (Nurudin, 2001: 6).

Qualter (Nurudin, 2001: 9-10) mengatakan bahwa propaganda adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja oleh beberapa individu atau kelompok untuk membentuk, mengawasi atau mengubah sikap dari kelompok-kelompok lain dengan menggunakan media komunikasi dengan tujuan bahwa pada setiap situasi yang tersedia, reaksi dari mereka yang dipengaruhi akan seperti yang diinginkan oleh si propagandis. Sementara itu, dalam konteks

politik internasional, Puji Rianto menuturkan propaganda telah memainkan peranan yang menentukan dalam upayanya suatu negara meraih tujuan-tujuan politik yang sudah ditetapkan (Rianto, 2008: 76; Holsti, 1983).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dasar (*basic research*). Penelitian jenis ini disebut pula sebagai penelitian akademik atau penelitian murni yang hanya bertujuan untuk pemahaman mengenai suatu masalah yang mengarah pada manfaat teoretis dan berorientasi tidak pada manfaat praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Satuan analisisnya merupakan dokumen dan literatur yang berkaitan dan relevan dengan konteks penelitian. Peneliti mencari sekaligus memilah data utama yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Untuk itu digunakan cuplikan selektif sebagaimana disebut Goetz dan LeCompte sebagai *criterion based selection* (Sutopo, 2002).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur. Studi dokumen (*document study*), dengan memanfaatkan berbagai bahan dokumen baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Di mana dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh (Bungin, 2008: 122; Bowen, 2009). Sementara studi literatur, dengan menggunakan berbagai sumber-sumber pustaka/bahan untuk menelaah, melacak berbagai macam jawaban dari persoalan serta mengetahui

konteks mengenai fokus kajian penelitian. Metode kajian ini menuntut untuk menginterpretasikan data dan melakukan pengecekan dengan sumber data lainnya untuk memperoleh hasil yang baik (Keraf, 2004: 187-188).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif Miles dan Huberman. Pada analisis interaktif Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif akan melibatkan tiga komponen yakni *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusions drawing and verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Oleh karena itu, dalam penelitian ini data dianalisis secara induktif. Dengan demikian, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana dalam penelitian kuantitatif dimana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis (Miles dan Huberman, 1992).

Kemudian, teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan *trustworthiness*, di mana data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Menurut Noeng Muhajir, dalam epistemologi naturalistik, keterandalan penelitian bertumpu pada empat elemen: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Dengan menggunakan keempat elemen itu kita bisa menguji keabsahan penelitian terhadap kualitas instrumen termasuk data-data yang diperoleh (Denzin dan Lincoln, 1994: 114; Muhajir, 1992; Sutopo, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Film menjadi wahana efektif dalam menanamkan suatu pesan kepada khalayak penontonnya. Merujuk pada Usmar Ismail, hal ini dapat terjadi karena film sanggup mendobrak pertahanan akal dan langsung berbicara ke dalam hati sanubari penonton secara meyakinkan (Ismail, 1983: 47-48). Melihat berbagai kelebihan tersebut, rasanya tak heran apabila para penguasa pun menggunakan media ini sebagai alat propaganda mereka dengan pamrih kepentingan *status quo*, legitimasi, kultus individu, pengaburan ingatan hingga manipulasi sejarah.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Marselli Sumarno bahwa potensi film itu tergantung kepada siapa pembuat film tersebut. Sumarno menuturkan: “Membicarakan potensi film masalahnya kembali kepada pembuat film yang dengan sudut pandangan tertentu merekam realitas. ... apalagi film juga berfungsi sebagai medium komunikasi” (Sumarno, 1994: 20).

Budi Irawanto menambahkan bahwa film propaganda merupakan manifestasi dari kekuasaan yang berjalan ketika itu di mana kekuasaan itu pun dapat dilihat melalui film. “Keberadaan film propaganda tidak hanya karena kekuasaan di luar film yang hendak memeralatnya tetapi karakter film itu sendiri merupakan medium propaganda yang sempurna. Dengan kata lain, film bisa menjadi medium untuk membangun kekuasaan dan lewat film pula sesungguhnya kekuasaan terukir dengan jelas” (Irawanto, 2004: 3).

A. Masa Kolonial Belanda

Berpijak dari uraian Krishna Sen, film propaganda pertama di Indonesia pertama dibuat pada tahun 1936 oleh *Algemeen Nederlandsh-Indisch Film* (ANIF) berjudul *Tanah Seberang*. Hal ini sebagaimana diuraikan olehnya berikut ini: “Pada tahun 1936, ANIF memproduksi film propaganda Indonesia pertama, Tanah Seberang. Disutradarai oleh pembuat film dokumenter Belanda, Mannus Franken, film ini memuji kebijakan transmigrasi pemerintah Belanda yang memindahkan sebagai populasi dari Jawa ke Sumatera. Film ini adalah pesanan *Central Comitte for Emigration and Colonisation for Natives*, serta memperoleh sponsor dan dukungan yang tidak sedikit dari berbagai departemen pemerintah termasuk kepolisian, jawatan kereta api dan Balai Pustaka (perusahaan penerbit milik pemerintah). Gamelan yang dipergunakan di film ini pun berasal dari Sultan Yogyakarta dan Bupati Malang” (Sen, 2009: 27). Film *Tanah Seberang* bertutur mengenai seorang petani asal Jawa dan keluarganya yang sukses hidup di tanah seberang setelah mengikuti program transmigrasi dari pemerintah kolonial Belanda. Krishna Sen menceritakannya sebagai berikut: “*Tanah Seberang* berkisah mengenai seorang petani Jawa bernama Sukromo beserta keluarganya yang sukarela ikut dalam program kolonisasi Lampung demi mencari penghidupan yang lebih baik. Sesampainya di Lampung, mereka mendapati komunitas pedesaan yang telah mapan di mana Sukromo dan keluarga disambut hangat, dan segera ikut serta dalam panen musiman. Setelah mampu memenuhi kebutuhan primernya dengan memanen hasil

tani penduduk lainnya, Sukromo membuka lahan baru di hutan, kemudian membangun rumah dan sawahnya sendiri. Di akhir film, Sukromo tak saja menjadi seorang petani sukses, namun juga menjabat kepala desa” (Sen, 2009: 27).

Dalam perkembangan selanjutnya, dari uraian dan pelacakan yang ada didapat bahwa ANIF, sebuah perusahaan film Belanda ini memiliki peranan signifikan bagi sejarah produksi film Indonesia karena tiga alasan. Pertama, perusahaan ini memproduksi sebuah film musikal romantik yang sangat laku. Film ini adalah film pertama yang seluruh karakternya dimainkan oleh orang pribumi serta didasarkan pada cerita dan scenario yang ditulis oleh orang Indonesia asli. Kedua, ANIF memproduksi film propaganda pemerintah (Belanda-pen.) yang pertama. Ketiga, pada 1950, ANIF berubah menjadi perusahaan Film Negara (PFN), sebuah unit produksi independen milik pemerintah (Indonesia-pen.) (Sen, 2009: 26).

B. Masa Kolonial Jepang

Sementara film benar-benar digunakan sebagai media propaganda adalah ketika masa kolonial Jepang. Hal ini sebagaimana diungkapkan Budi Irawanto berikut ini: “Pemanfaatan film sepenuhnya sebagai alat propaganda terjadi pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) melalui penutupan perusahaan film swasta dan pemusatan produksi di tangan pemerintah pendudukan Jepang” (Irawanto, 2004: 9). Ini senada dengan apa yang dicatat oleh SM Ardan bahwa, “Selama menduduki Indonesia (1942-1945) Jepang lebih banyak membikin film penerangan dan propaganda” (Ardan, 1992: 30). Dalam uraiannya, Misbach Yusa

Biran mencatat bahwa Jepang sangat menyadari amat pentingnya media film sebagai alat propaganda. Biran kembali mengurai bahwa enam sesudah Jepang menduduki negeri ini, *Gunseikanbu* (Pemerintahan Militer) mendidikan *Sendenbu* (Badan Propaganda dan Penerangan). Kemudian pada April 1943, *Sendenbu* mendirikan *Keimin Bunka Shidosho* (Pusat Pendidikan Populer dan Pengembangan Kebudayaan) atau Pusat Kebudayaan, di mana badan ini berperan untuk mengembangkan kebudayaan tradisi Indonesia; memperkenalkan dan mensosialisasikan kebudayaan Jepang serta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan seniman-seniman Indonesia (Kurasawa, 1997; Biran, 2009).

SM Ardan pun menilai hal yang serupa bahwa kata kunci utama dalam film adalah untuk penerangan dan propaganda. Ia mengungkapkan bahwa “Jepang memang kurang mementingkan segi komersil. Yang penting tujuan tercapai: penerangan dan propaganda. Lebih-lebih dalam film-film non-cerita, di mana ditekankan, antara lain, bahwa militer Jepang bukanlah aggressor, tapi adalah pembebas bangsa Asia dari perbudakan bangsa-bangsa Barat” (Ardan, 1992: 34).

Hal ini senada dengan apa yang dituliskan Rita Sri Hastusi (1992: 34) di mana film propaganda Jepang yang didatangkan langsung dari Jepang yang penuh dengan gambaran tentang keunggulan Jepang antara lain *Nankai no Hanabata* (Bunga dari Selatan), *Shogun to Sanbo to Hei* (Jenderal dan Prajurit), *Singaporu Soko Geki* (Penyerangan Umum di atas Singapura) dan *Eikoku Koezoeroeroe No Hi* (Saat Inggris

Runtuh).

Rita Sri Hastuti mengungkapkan bahwa film propaganda ingin mengukuhkan betapa kuat dan tangguhnyanya bala tentara Jepang dalam berbagai pertempuran. Hastuti mencatat bahwa “Film-film propaganda yang dimaksud berupa *slide* tentang tentara Nippon, diputar sebelum pemutaran film cerita. Tujuannya, membuat masyarakat mengetahui betapa besar dan kuatnya bala tentara Jepang yang menghasilkan kemenangan-kemenangan di dalam peperangan. Dengan begitu, secara psikologis masyarakat Indonesia yang melihat film dokumenter itu diharapkan terpengaruh. Jepang juga ingin memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Jepang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ide *Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya* dengan jalan apapun termasuk menyingkirkan penghalang yang dapat menggagalkan tujuannya” (Hastuti, 1992: 37-38).

Dalam film tersebut memperlihatkan adegan pertempuran yang seru, dan betapa hebatnya tentara Jepang dalam mengalahkan kekuatan tentara Barat yang selama ini diagung-agungkan. Film-film dokudrama mengenai peperangan di Hongkong, Cina, dan wilayah lain seperti *Sina No Yoru, Tank Nisizuni, Sayap Meliputi Burma, Kemenangan Sayap, Harimau Melayu*, sangat membantu memperkuat kepercayaan bangsa Indonesia bahwa Jepang memang hebat. Terutama karena di depan mata bangsa Indonesia sendiri, Jepang bisa menyapu Belanda begitu cepat (Biran, 2009: 336-337).

C. Pemerintah Orde Lama

Masa pemerintahan Orde Lama pun

tidak lepas dari kesadaran bahwa film merupakan wahana yang tepat dalam menanamkan pesan tertentu. Hal ini sebagaimana disampaikan Gotot Prakosa bahwa melalui film kerap digunakan untuk suatu orientasi bagaimana memanfaatkan politik dan kedudukan yang ada (Prakosa, 2004: 49). Budi Irawanto mengurai bahwa sebagai bagian cara pengelabuan massa, film propaganda bekerja lewat representasi yang bersifat monolitik dan sepihak. Adapun film propaganda dalam masa ini adalah *Images of Soekarno* (1950-an dan 1960-an). Dalam film tersebut digambarkan suatu representasi “Bapak”. Hal ini sebagaimana diuraikan Budi Irawanto: “Soekarno dalam *Images of Soekarno*, umpamanya, secara eksplisit mengklaim dirinya sebagai “Bapak Rakyat.” Pada pidato pembebasan Irian Barat di Yogyakarta pada 19 Desember 1963, ia dengan lantang mengatakan bahwa pembebasan Irian Barat dari kekuasaan Belanda bukan karena kepentingan pribadinya, melainkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, ia sekadar menyuarakan apa yang terjadi gejolak di hati rakyat: Irian musti dibebaskan dari kaum imperialis dan kolonialis Belanda” (Irawanto, 2004: 9-10).

D. Pemerintahan Orde Baru

Masih mengusung misi yang sama Orde Baru pun mengusung berbagai propagandanya melalui media film. Ini senada dengan apa yang diutarakan Ariel Heryanto di mana sedari awal militer (Orde Baru) sadar akan kekuatan film sebagai alat propaganda. Heryanto mengurai bahwa “Sejak awal berkuasa, militer memahami kekuatan film sebagai alat propaganda. Pada 15 April 1969, Panglima Komando Operasi

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) mengeluarkan keputusan tentang dibentuknya “Projek Film Koptamtib” untuk memproduksi film dokumenter sebagai “media *psywar*”. Menurut Laporan Komnas HAM 2012, Koptamtib merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab atas kejahatan berat kemanusiaan dalam kurun 1965-1966” (Heryanto, 2012).

Merujuk pada *Tempo* edisi 1-7 Oktober 2012, film seperti *Pengkhianatan G-30-S/PKI* merupakan film propaganda Orde Baru. Hal ini senada dengan apa yang dicatat Nurudin bahwa film *Pengkhianatan G-30-S/PKI* merupakan produk propaganda. Nurudin mengungkapkan: “Di Indonesia propaganda lewat film nyata terlihat dalam pemutaran film *Pengkhianatan G-30-S/PKI* yang pada zaman pemerintahan Soeharto setiap setahun sekali (malam 30 September) diputar di stasiun TVRI. Sekitar tahun 80-an atau awal kemunculan film ini siswa-siswa wajib menontonnya. Pesan yang dikandung dalam propaganda film tersebut adalah bahwa bangsa Indonesia harus waspada bahaya laten terhadap PKI. Soeharto digambarkan satu-satunya pahlawan dalam menumpas pemberontakan itu” (Nurudin, 2001: 37).

Selama masa kepresidenan Soeharto atau pemerintahan Orde Baru, film berkisah penculikan serta pembunuhan tujuh jenderal revolusi itu selalu diputar pada 30 September oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Bahkan tak hanya televisi yang wajib menayangkannya, seluruh sekolah pun mengharuskan murid-muridnya menonton untuk kemudian membuat resensi film itu sebagai tugas sekolah (Tempo.co, 2012a;

Tempo.co, 2012b; Tempo.co, 2012c).

Film ini menjadi film wajib tonton pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Sehingga tak heran apabila film *Pengkhianatan G30S/PKI* adalah salah satu film yang berhasil menyedot penonton terbanyak. Data Peredaran Film Nasional menyatakan karya berdana Rp 800 juta itu menjadi film terlaris pertama di Jakarta pada 1984, dengan jumlah penonton 699.282 orang dan tak pelak pada 1985, di Festival Film Indonesia, film ini mendapat penghargaan Piala Antemas untuk kategori film unggulan terlaris 1984-1985 (Tempo.co, 2012b; Tempo.co, 2012c; Tempo.co, 2012d; Tempo.co, 2012e; Ardan, 1992: 119).

Namun dalam perkembangannya film berdurasi 4 jam yang wajib disiarkan setiap malam tanggal 30 September itu tak lagi tayang di televisi mulai tahun 1998. Sebagaimana diwartakan *Kompas*, 24 September 1998, Menteri Penerangan saat itu, Yunus Yosfiah mengatakan pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film *Pengkhianatan G30S/PKI*, *Janur Kuning*, *Serangan Fajar* tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. “Karena itu, tanggal 30 September mendatang TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film *Pengkhianatan G30S/PKI*” (Tempo.co, 2012f; Tempo.co, 2012g). Keterangan dari Yunus Yosfiah ini sejalan dengan apa yang dipaparkan Nurudin bahwa “Hal demikian juga ditunjukkan pada film-film yang disponsori pemerintah seperti, *Janur Kuning*, *Enam Jam di Yogya*, dan *Serangan Fajar*. Propaganda lewat film kadang membenarkan (dengan tujuan memengaruhi persepsi publik) tindakan yang salah, ini yang justru menjadi persoalan. Dalam salah satu film

tersebut dikemukakan bahwa ide *Serangan Oemoem* (SO) 1 Maret berasal dari Soeharto. Saat sekarang pendapat itu ditentang bahwa yang mempunyai ide SO adalah Sri Sultan HB IX dan bukan Soeharto” (Nurudin, 2001: 37).

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam mengatakan film 'Pengkhianatan G30S' adalah satu dari sekian banyak propaganda rezim Orde Baru untuk mendiskreditkan Partai Komunis Indonesia. “Masih ada propaganda selain film”. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa “Pemerintah Orde Baru ingin melegitimasi rezim yang didominasi militer”. Asvi pun menilai bahwa Orde Baru berhasil menanamkan stigma negatif kepada PKI. Buktinya, selama puluhan tahun masyarakat “ketakutan” ketika mendengar segala sesuatu yang berkaitan dengan PKI. Ia menuturkan: “Mau mantu saja bisa batal kalau calonnya ada 'bau' PKI-nya” (Tempo.co, 2012h).

Kemudian sebagaimana diungkapkan pula bahwa bahwa banyak film propaganda lain dari Orde Baru. Diantaranya, *Enam Djam di Jogja*, *Janur Kuning* dan *Serangan Fajar* pun tak luput dari berbagai gugatan dan pertanyaan dari berbagai pihak. Penelitian yang dilakukan Budi Irawanto (1999: 178) melalui pendekatan analisis semiotik terhadap ketiga film tadi menemukan kecenderungan bahwa film ternyata tidak sebatas sebagai medium hiburan melainkan dapat berperan pula sebagai medium hegemoni militer. Ia mencatat bahwa ada suatu bentuk legitimasi historis berkaitan dengan dominasi militer atas sipil di mana keunggulan militer atas sipil sengaja diproduksi. Ia menuturkan: “Militer melalui

konstruksi citra yang mengambil basis historis, melakukan marginalisasi peran sipil. Karena itu, konstruksi relasi sipil-militer di Indonesia tidaklah setara, melainkan dominative. Dengan kata lain, semua ini merupakan pembenaran historis terhadap dominasi militer atas sipil. Sejumlah film yang menjadi objek kajian ini, dengan gambling merepresentasikan keunggulan modus perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh militer, dibandingkan dengan modus perjuangan diplomasi yang dilakukan elit politik sipil. Bahkan dalam film-film ini pula, modus perjuangan diplomasi nyaris mengalami eliminasi” (Irawanto, 1999: 178).

Selain itu, dari kajian yang ia lakukan terutama di dalam *Janur Kuning* dan *Serangan Fajar*, Soeharto benar-benar menjadi tokoh sentral dan menjadi pusat narasi dari cerita yang disajikan dalam film sementara tokoh lainnya yang notabenehnya diambil dari tokoh riil hanya sekadar menjadi peran pembantu semata (Irawanto, 1999: 180). Hal ini jelas merupakan bentuk konstruksi untuk kultus dan legitimasi tokoh tertentu yakni Soeharto maka tak salah manakala Yunus Yosfiah, Menteri Penerangan pada 1998 melarang pemutaran film-film tersebut karena tentunya dapat menimbulkan distorsi kesadaran dan menjadi kultus individu.

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa film sebagai sebuah media benar-benar tidaklah netral. Film mampu memainkan peranan sedemikian rupa dengan berbagai pesan yang disuntikkan,

ditempelkan serta dikonstruksikan di dalamnya di mana film bukan lagi sekadar media hiburan. Untuk konteks penelitian ini, film ternyata mahir memainkan peranan propaganda secara apik dari masa ke masa khususnya dalam konteks yang dikaji dalam penelitian ini adalah sejak masa kolonial, Orde Lama dan Orde Baru. Temuan mendasar dari penelitian ini sesuai dengan semangat penelitian fundamental adalah: Pertama, adanya relasi yang erat di mana penguasa (pemerintah) tanggap untuk menjadi media film sebagai alat propaganda dengan berbagai maksud dan tujuan yang diinginkan penguasa, sehingga dapat dikatakan bahwa propaganda merupakan usaha sadar, sistematis, terencana dan bertujuan konkrit. Kedua, kecenderungan makna propaganda yang muncul senantiasa berkaitan dengan maksud pembentukan “image” penguasa yang baik dan hebat. Selain itu, propaganda yang dijalankan berpamrih pula untuk menarik simpati dan dukungan rakyat, legitimasi, *status quo* atau pun membentuk distorsi kesadaran sekaligus melakukan pembentukan sejarah versi “penguasa”. Ketiga, melalui film sesungguhnya kita dapat mengetahui mentalitas, relasi kuasa hingga identitas sebuah bangsa serta fakta zaman yang terekam dan tersimpan dalam teks-teks film karena tentunya film lahir dengan lingkupan sosio kultur atau konteks suatu zaman tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhajar, Eka Nada Shofa. 2010. “Masa-masa Suram Dunia Perfilman Indonesia”.
- Surakarta: Tesis Pascasarjana Ilmu Komunikasi UNS. Tidak Diterbitkan.
- Alkhajar, Eka Nada Shofa. 2011. “Menguak Relasi Patriotisme, Revolusi dan Negara dalam Film Indonesia,” *Humaniora*, Vol. 16, No. 1, April.
- Ardan, SM. 1992. *Dari Gambar Idoep ke Sinepleks*. Jakarta: GPBSI.
- Biran, Misbach Yusa. 2009. *Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film di Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Bungin, Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Bowen, G.A. 2009. “Document Analysis as Qualitative Research Method”, *Qualitative Research Journal*, Vol. 9. No.2.
- Denzin, Norman K. and Yvanna S. Lincoln (Eds). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publication.
- Fiske, John. 1990. *Introduction to Communication Studies*. London: Routledge.
- Hastuti, Rita Sri. 1992. “Berjuang di Garis Belakang,” dalam Haris Jauhari (ed), *Layar Perak, 90 Tahun Bioskop di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Heryanto, Ariel Heryanto. 2012. “Film, Teror Negara dan Luka Negara”, *Tempo*, 1-7 Oktober.

- Holsti, KJ. 1983. *International Politics: A Frame Work for Analysis*. Fourth Edition. New Jersey: Prentice-Hall, 1983.
- Ismail, Usmar. 1983. *Usmar Ismail Mengupas Film*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Irawanto, Budi. 1999. *Film, Ideologi dan Militer, Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Irawanto, Budi. 2004. "Film Propaganda: Ikonografi Kekuasaan", *Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 1 Juli.
- Jowett, Garth and J.M. Linton. 1980. *Movies as Mass Communication*. London: Sage Publication.
- Keraf, Gorys. 2004. *Komposisi*. Ende: Nusa Indah.
- Kracauer, Sigfried. 1974. *From Cagliari to Hitler: A Psychological History of the German Film*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kurasawa, Aiko. 1997. "Films as Propaganda Media on Java Under the Japanese, 1942-1945," in Grant K. Goodman (ed), *Japanese Cultural Policies in Southeast during World War 2*. New York: St. Martin's Press.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muhajir, Noeng. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nurudin. 2001. *Komunikasi Propaganda*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prakosa, Gotot Prakosa. 2004. "Film dan Penguasa" dalam *Film dan Kekuasaan*. Jakarta: Yayasan Seni Visual Indonesia.
- Rianto, Puji. 2008. "Globalisasi Media dan Transformasi Politik Internasional", *Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, Juni.
- Sen, Krishna. 2009. *Kuasa Dalam Sinema: Negara, Masyarakat dan Sinema Orde Baru*. Jakarta: Ombak.
- Sumarno, Marselli. 1994. *Perfilman Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Film.
- Sutopo, H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tempo.co (2012a, 29 September), "Cerita Anak Jenderal D.I. Panjaitan Soal G30S PKI". Diakses dari <http://www.tempo.co/edsus/konten-berita/politik/2012/09/29/432722/6/Cerita-Anak-Jenderal-DI-Panjaitan-Soal-G30SPKI>, 16 Oktober 2012.
- Tempo.co (2012b, 29 September), "Film Pengkhianatan G30S/PKI, Propaganda Berhasilkah?". Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/29/078432667/Film-Pengkhianatan-PKI-Propaganda-Berhasilkah>, 16 Oktober 2012.
- Tempo.co (2012c, 29 September), "Film Pengkhianatan G30S/PKI, Dicerca dan Dipuji". Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/29/078432673/Film-Pengkhianatan-G-30-SPKI-Dicerca-dan-Dipuji>, 16 Oktober 2012.
- Tempo.co (2012d, 29 September), "Film Pengkhianatan G30S/PKI di Mata Para Sineas". Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/29/078432677/Film-Pengkhianatan-G-30-SPKI-di-Mata-Para-Sineas>, 16 Oktober 2012.

Tempo.co (2012e, 29 September), “Kekuatan Film Pengkhianatan G30S/PKI Luar Biasa”. Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/29/078432670/Kekuatan-Film-Pengkhianatan-G-30-SPKI-Luar-Biasa>, 16 Oktober 2012.

Tempo.co (2012f, 29 September), “Cerita di Balik Penghentian Pemutaran Film G30S”. Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/29/078432758/Cerita-di-Balik-Penghentian-Pemutaran-Film-G30S>, 16 Oktober 2012.

Tempo.co (2012g, 29 September), “Film Pengkhianatan G30S/PKI di Mata “Soeharto”. Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/29/078432684/Film-Pengkhianatan-G-30-SPKI-di-Mata-Soeharto>, 16 Oktober 2012.

Tempo.co (2012h, 29 September), “Film G30S, Satu dari Sekian Propaganda Orde Baru”. Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/29/078432757/Film-G30S-Satu-dari-Sekian-Propaganda-Orde-Baru>, 16 Oktober 2012.

Turner, Graeme. 1993. *Film as Social Practice*. London: Routledge.